

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia salah satu negara berkembang yang memiliki populasi penduduk terbanyak ke empat di dunia, dengan jumlah penduduk yang mencapai 253.60 juta jiwa. Dengan pola pertumbuhan penduduk makin hari makin cepat, maka penggunaan transportasi akan semakin meningkat. Jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan perkotaan setiap harinya sangat banyak bahkan melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Mobilitas yang tinggi mendorong tingginya kepadatan lalu lintas, baik barang maupun manusia diseluruh dunia. Melihat perkembangan yang ada dari kepadatan lalu lintas tersebut, semakin banyak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa jalan raya justru menjadi wadah pembunuh manusia modern, manusia modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradapan masa kini.¹

Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar risiko timbulnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

¹ Wulandari Fitria, 2015, *Pemahaman Pelajar Tentang Disiplin Berlalu Lintas*, Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 53.

mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan.

1. Faktor manusia

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara, dan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh pengemudi jalan lainnya.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor lingkungan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya

kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.²

Selama ini masyarakat belum banyak menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.³

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua

² Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 21

³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal.98.

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴

Menyadari bahwa pentingnya fasilitas lalu lintas tersebut, perlu adanya kesadaran dari semua orang untuk menjaga fasilitas lalu lintas tersebut. Maka perlu di hadirkan regulasi mengenai bagaimana menjaga fasilitas lalu lintas. Regulasi ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum ini diatur dalam Pasal 234 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Pasal 234 ayat 2 berbunyi :

“setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi”

Mengingat asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat di pertanggung jawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan bedakan perbuatan yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar perngertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggung

⁴ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hal. 27.

jawab merupakan unsur pertanggung jawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan⁵ Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Kasus diPolres Klaten)**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum tersebut ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh polres klaten dalam penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, hal. 68.

⁶ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal 260.

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban kerusakan fasilitas umum yang dilalukan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui kedala dalam penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil bagi penulis, aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan dapat menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilhum hukum pidana khususnya dalam hal tanggung jawab kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait tanggung jawab kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi aparat penegak hukum terkait dengan tanggung jawab kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Pemikiran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dalam Pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni “diteruskannya celaan yang objektif yang pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya : tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁷ Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁸

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

⁷ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 78.

⁸ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, Semarang: FH UNDIP, hal.85.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum, pelaku wajib bertanggungjawab atas rusaknya fasilitas umum itu. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan telah tercantum pengaturan tentang pertanggungjawaban kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh kecelakaan, terkait ketentuan pidananya termuat dalam Pasal 234 ayat (2).

Pasal 234 ayat (2) berbunyi:

“setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi”

Dengan adanya peraturan yang disebutkan di atas dapat mengurangi tingkat kelalaian dalam berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan. Perbuatan lalai dalam berkendara dapat membahayakan pengendara lainnya serta dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapat jawaban atas pokok permasalahan.⁹ Maka penulis dalam

⁹ Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal.2.

mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁰ Penulis akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pertanggung jawaban kerusakan fasilitas umum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian diskriptif, yaitu dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan seteliti mungkin secara sistematis tentang pertanggungjawaban kerusakan fasilitas umum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas khususnya di Polres Klaten.

3. Lokasi Penelitian

¹⁰Amiruddin & Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19.

¹¹ Soerjono Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Klaten, pengambilan lokasi ini karena banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan keusakan fasilitas umum sehingga dilokasi tersebut memungkinkan untuk memperoleh sumber data untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta dilapangan melalui wawancara di Polres Klaten yang terkait dengan pertanggungjawaban kerusakan fasilitas umum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlaku mengikat.
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder

¹² Zaenal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal.30.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berlakunya tidak mengikat dan diperoleh dari literature.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi yang menjadi obyek dalam penelitian serta melakukan studi lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait di Polres Klaten yang selanjutnya akan dikaji serta dipelajari secara utuh.

6. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 192.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang kecelakaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang fasilitas umum, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum lalu lintas.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai pertanggung jawaban pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum, serta kendala dalam penanganan pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

BAB IV adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.